



Judul : UU ITE Kerap Kriminalisasi Perempuan
Tanggal : Jumat, 19 Maret 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

UU ITE Kerap Kriminalisasi Perempuan

KOMISI Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komnas Perempuan mendukung revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dukungan itu disampaikan saat memberi masukan kepada Tim Kajian UU ITE.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mencatat pengaduan kekerasan berbasis siber naik hingga tiga kali lipat di 2020. UU ITE cenderung diskriminatif terhadap perempuan dan kerap kali digunakan dalam sejumlah kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus kekerasan seksual, dan kasus korban eksploitasi seksual.

“Untuk kasus KDRT, ataupun kekerasan seksual lainnya, ketika korban menyampaikan pengalamannya ataupun kekesalannya melalui ruang siber, semua dipukul rata menggunakan UU ITE,” ujar Andy, kemarin, dalam kete-

rangannya saat berbicara di Focus Grup Discussion (FGD) bersama Tim Kajian UU ITE yang berlangsung secara virtual.

Andy menambahkan, Komnas Perempuan tengah menyoroti sejumlah pasal UU ITE yang bersifat sumir. Ketentuan itu membuat perempuan menjadi pihak yang dikriminalkan melalui UU ITE.

“Pertama adalah tentang frasa-frasa di dalam sejumlah pasal dalam UU ITE bersifat sangat sumir. Misalnya pada Pasal 27 ayat 1, dengan muatan yang melanggar (kesusilaan), ini sudah bolak-balik dipermasalahkan,” jelas Andy.

Selain Pasal 27 ayat 1, Andy juga menyorot sejumlah pasal lainnya, seperti Pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik dan pasal yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi di Pasal 29.

Komisioner Komnas HAM Sendrayati

Moniaga menegaskan dukungan atas revisi UU ITE. Itu demi melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Komnas HAM juga tengah menyusun standar norma dan pengaturan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang bisa digunakan sebagai acuan dalam proses revisi UU ITE.

Seusai menerima masukan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM, Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo menilai masukan Komnas Perempuan dan Komnas HAM memperkaya sudut pandang. “Ini menjadi satu masukan dalam perspektif yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kemarin kita bertemu dengan akademisi menyampaikan pandangan-pandangannya,” ujarnya.

Selanjutnya, tim akan menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga, DPR, serta partai politik. (Cah/P-2)